

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Mirza, 2012).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perbaikan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur

utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial (Mirza, 2012).

IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM merupakan alat kebijakan yang merupakan hasil komprehensif dari berbagai faktor. IPM hadir sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi (Latuconsina, 2017).

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat PDRB saja, tetapi juga melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan kondisi yang sejahtera. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Karesidenan Pati sebagai daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa memiliki nilai IPM yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan peringkat IPM antardaerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2007 sampai 2018 memperlihatkan bahwa daerah-daerah di Karesidenan Pati mengalami ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusianya. Perkembangan rata-rata IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018 ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rata-Rata IPM di Karesidenan Pati Tahun 2007-2018

Tahun	Rata-Rata IPM
2007	70,926
2008	71,394
2009	71,886
2010	65,732
2011	66,494
2012	67,176
2013	67,874
2014	68,368
2015	69,130
2016	69,486
2017	70,244
2018	70,816

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1., terlihat bahwa IPM di Karesidenan Pati walaupun meningkat, tapi peningkatannya cenderung rendah dan belum mencapai level tinggi. IPM tertinggi di Karesidenan Pati adalah pada tahun 2009 sebesar 71,886 poin, sedangkan IPM terendah adalah pada tahun 2010 sebesar 65,732 poin. Pada tahun 2011 hingga 2017 IPM di Karesidenan Pati selalu mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit. Dalam peningkatan tersebut IPM mencapai angka 70,816 persen di tahun 2018. Peningkatan IPM di Karesidenan Pati mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Karesidenan Pati sehingga terjadi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi IPM adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi penghalang bagi penduduk untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Todaro dan Smith (2015) dalam teori modal manusia (*human capital*) menyatakan bahwa penduduk yang tidak mampu mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan akan memiliki keterampilan

yang rendah sehingga menurunkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Hal tersebut menjadi mata rantai kemiskinan yang tidak mudah untuk diuraikan (*vicious circle of poverty*). Perkembangan jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati ditampilkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin dan Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin di Karesidenan Pati Tahun 2007-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2007	154.700	18,626
2008	146.800	17,506
2009	133.380	15,976
2010	125.560	14,668
2011	127.460	14,882
2012	117.920	13,720
2013	117.340	13,280
2014	110.080	12,352
2015	109.180	12,196
2016	107.620	11,904
2017	106.440	11,696
2018	94.060	10,238

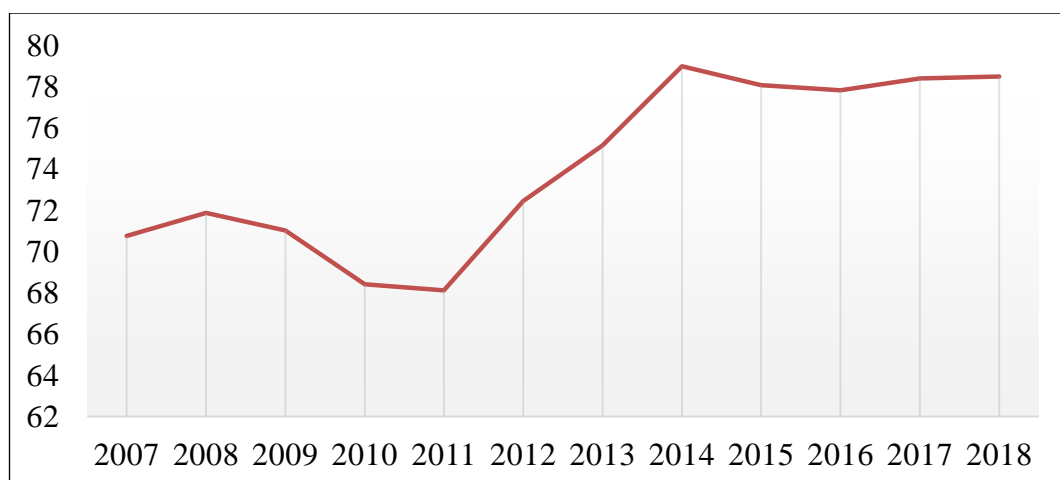
Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati mengalami penurunan selama kurun waktu 2007-2018. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan baik makanan maupun non-makanan. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut belum sepenuhnya mengurangi masalah kemiskinan di Karesidenan Pati. Selama kurun waktu 2007-2018 persentase jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati masih terbilang tinggi yaitu di atas 10 persen per tahun. Hal tersebut mencerminkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah di Karesidenan Pati belum dijalankan

dengan maksimal sehingga masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit mencapai kesejahteraan ekonomi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah angka partisipasi murni. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memperoleh dan menggunakan informasi dan memperoleh pemahaman akan perekonomian serta memberikan pilihan apakah seseorang ingin menjadi konsumen, produsen, atau menjadi warga negara biasa. Secara tidak langsung pendidikan juga berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga akan mencapai standar hidup yang lebih baik (Zuhairah dan Melailani, 2018). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan seseorang adalah angka partisipasi murni atau APM. APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan APM di Karesidenan Pati ditampilkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1. 1. Rata-Rata APM di Karesidenan Pati Tahun 2007-2018 (Persen)



Sumber: BPS Jawa Tengah

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai APM di Karesidenan Pati mengalami penurunan dari tahun 2008-2011. Hal ini berarti masih banyak penduduk usia 7-18 tahun di Karesidenan Pati yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Dampak dari rendahnya nilai APM adalah menurunnya keterampilan dan daya saing penduduk, sehingga produktivitas penduduk sebagai tenaga kerja juga akan menurun. Apabila produktivitas menurun, maka penduduk akan sulit terserap oleh pasar kerja, sehingga pada akhirnya akan menjadi pengangguran.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah tingkat pengangguran terbuka, yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara ekonomi pengangguran dianggap sebagai *job loss* atau hilangnya sumber pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga (Mankiw, 2010). Hal ini akan berpengaruh terhadap IPM karena rumah tangga yang tidak mempunyai pendapatan maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya, termasuk pendidikan dan kesehatan. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018 diperlihatkan pada Tabel 1.3.

Berdasarkan Tabel 1.3 di bawah, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2011 sejumlah 7,818 pesen. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati menandakan bahwa masih banyak angkatan kerja di Karesidenan Pati yang masih menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan sehingga tidak

mempunyai pendapatan. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun. Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Penganggur juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan penganggur tidak terpenuhi.

Tabel 1. 3. Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Bekerja di Karesidenan Pati Tahun 2007-2018

Tahun	Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Bekerja (Jiwa)
2007	6,162	465.155
2008	6,574	439.548
2009	6,414	458.058
2010	5,476	451.817
2011	7,818	454.342
2012	6,532	469.370
2013	6,780	471.742
2014	5,204	465.502
2015	4,356	475.714
2017	3,654	495.341
2018	3,370	501.149

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa IPM di Karesidenan Pati masih berada pada level sedang. Hal ini disebabkan oleh pengangguran dan jumlah orang miskin di Karesidenan Pati yang masih relatif tinggi dan juga masih banyaknya anak yang tidak bersekolah. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk miskin, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Karesidenan Pati tahun 2008-2017.

B. Rumusan Masalah

Kontribusi pemerintah masing-masing daerah terhadap peningkatan IPM dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam kebijakan mengurangi

jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan meningkatkan angka partisipasi murni. Oleh karena itu identifikasi dari berbagai macam faktor termasuk peran pemerintah daerah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Dari variabel independen dalam penelitian ini, nampak bahwa jumlah penduduk miskin di Karesidenan Pati yang cenderung mengalami penurunan selama periode 2007-2017. Turunnya jumlah penduduk miskin akan menstimulus daya beli sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat mampu mencukupi kebutuhan pokok serta kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti akses kesehatan dan pendidikan. Kemudian dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka di Karesidenan Pati yang juga mengalami penurunan selama periode 2007-2017. Apabila tingkat pengangguran terbuka turun maka pendapatan masyarakat akan bertambah sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga dapat tercukupi.

Selanjutnya peningkatan pada angka partisipasi murni dapat menyebabkan kualitas pendidikan anak juga meningkat karena salah satu langkah persiapan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan sesuai dengan tingkatan dan usianya. Jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan angka partisipasi murni merupakan instrumen dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas modal manusia Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan angka partisipasi murni terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan angka partisipasi murni terhadap IPM di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2007-2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan merealisasikan kebijakan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Karesidenan Pati. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi akademisi dan peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait IPM di Karesidenan Pati.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai literatur penelitian, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data beserta uji-uji pendukungnya.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan analisis deskriptif variabel penelitian, hasil estimasi dan uji-uji pendukungnya, interpretasi secara statistik, dan interpretasi secara ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan sarandari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.